



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

JL. KH. SAMANHUDI KOMPLEK PERKANTORAN, CANGAKAN, KARANGANYAR

Daftar Isi

Halaman Judul	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan	8
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	8
2.2. Struktur Organisasi	13
2.3. Sumber Daya Dinas	14
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
BAB III Gambaran dan Isu Strategis	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	19
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	19
3.3. Telaah Renstra Kementrian / Kelembagaan	19
BAB IV Tujuan Dan Sasaran	24
4.1. Tujuan	24
4.2. Sasaran	24
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	29
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	30
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	87
BAB VIII Penutup	93
8.1. Pedoman Transisi	93
8.2. Kaidah Pelaksanaan	93

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2
Gambar 1.2. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	13

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Berdasarkan Status Pendidikan	14
Tabel 2.3	Jumlah Aset Tanah Tahun 2022	15
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022	17
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2022	17
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022	18
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Tahun 2024-2026	25
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026	37
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Tahun 2024-2026	88
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Tahun 2024-2026	90
Tabel 7.3	Indikator Program Dinas Tahun 2024-2026	91

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar ini merupakan dokumen yang memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan pada periode tiga tahun mendatang sebelum adanya Kepala Daerah terpilih. Selain itu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja ini dapat memberikan gambaran tentang wujud pelayanan sesuai tugas dan fungsi.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, April 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARANGANYAR

MARTADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001

Lampiran XIV
Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor Tahun 2023 tentang Rancangan
Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengatur bahwa pemilu kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar akan berakhir pada tahun 2023, sehingga akan terdapat kekosongan kepala daerah sampai adanya penetapan kepala daerah hasil Pemilu Tahun 2024.

Oleh sebab itu, pada kurun waktu tersebut Kabupaten Karanganyar tidak memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah (RPJMD), karena menunggu pelantikan kepala daerah hasil Pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Karena Kabupaten Karanganyar belum menyusun RPJMD pada masa transisi tersebut, maka Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar 2024-2026.

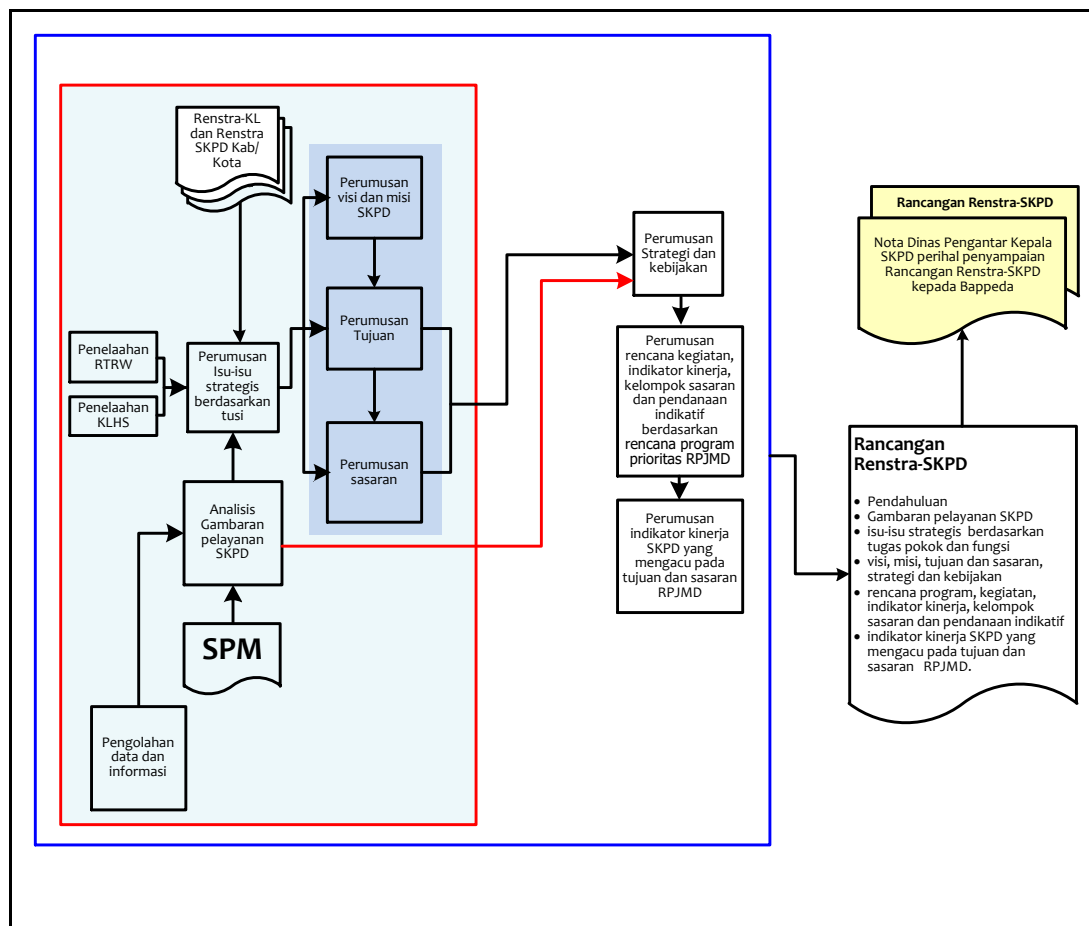
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tentang permasalahan, isu strategis, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat

Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yaitu urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja serta urusan penunjang pemerintahan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (RENSTRA PD) meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (RENSTRA PD) juga memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait, sehingga diharapkan ada sinergitas dalam perumusan strategi kebijakan pengembangan pertanian, pangan dan perikanan serta saling mendukung satu dengan yang lainnya

Tahapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA PD) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Tabel 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139).
33. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar No 49 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga kerja.

1.3 . Maksud dan Tujuan

Renstra Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan..

Adapun tujuan penyusunan Renstra Disdagperinaker Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi kondisi urusan Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan.
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026
3. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan perangkat daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

1.4 . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024-2026 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu strategis (data hasil diskusi isu strategis)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- 4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu anggaran

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1). Sub Bagian Keuangan.
 - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.membawahkan kelompok jabatan fungsional
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Perindustrian, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Tenaga Kerja , membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- f. UPT

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- 2) Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

- 3) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- 4) Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas, dan pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, informasi dan dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Pengoordinasian kegiatan
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, informasi dan dokumentasi
- 4) pengoordinasian organisasi dan tatalaksana
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan dan advokasi hukum
- 6) pengorganisasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang /jasa
- 8) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan struktur organisasi dalam Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekretaris membawahkan dua sub bagian yaitu

a. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja , pengelolaan keuangan dan asset serta pelaporan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan , hukum, kerumahtanggaan, kerjasama , kearsipan, kehumasan, informasi dan dokumentasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian

c. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang tenaga kerja mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
- 4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala bidang perindustrian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian .

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang perindustrian kerja mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan perindustrian
- 2) pelaksanaan koordinasi teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan perindustrian
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan , perlindungan , pengawasan dan pemeriksaan perindustrian;
- 4) pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan , perlindungan , pengawasan dan pemeriksaan perindustrian;
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Kepala Bidang Tenaga Kerja

Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas kepala bidang tenaga kerja mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
- 2) pelaksanaan koordinasi bidang penempatan , hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
- 4) pemantauan , evaluasi dan pelaporan bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. UPTD

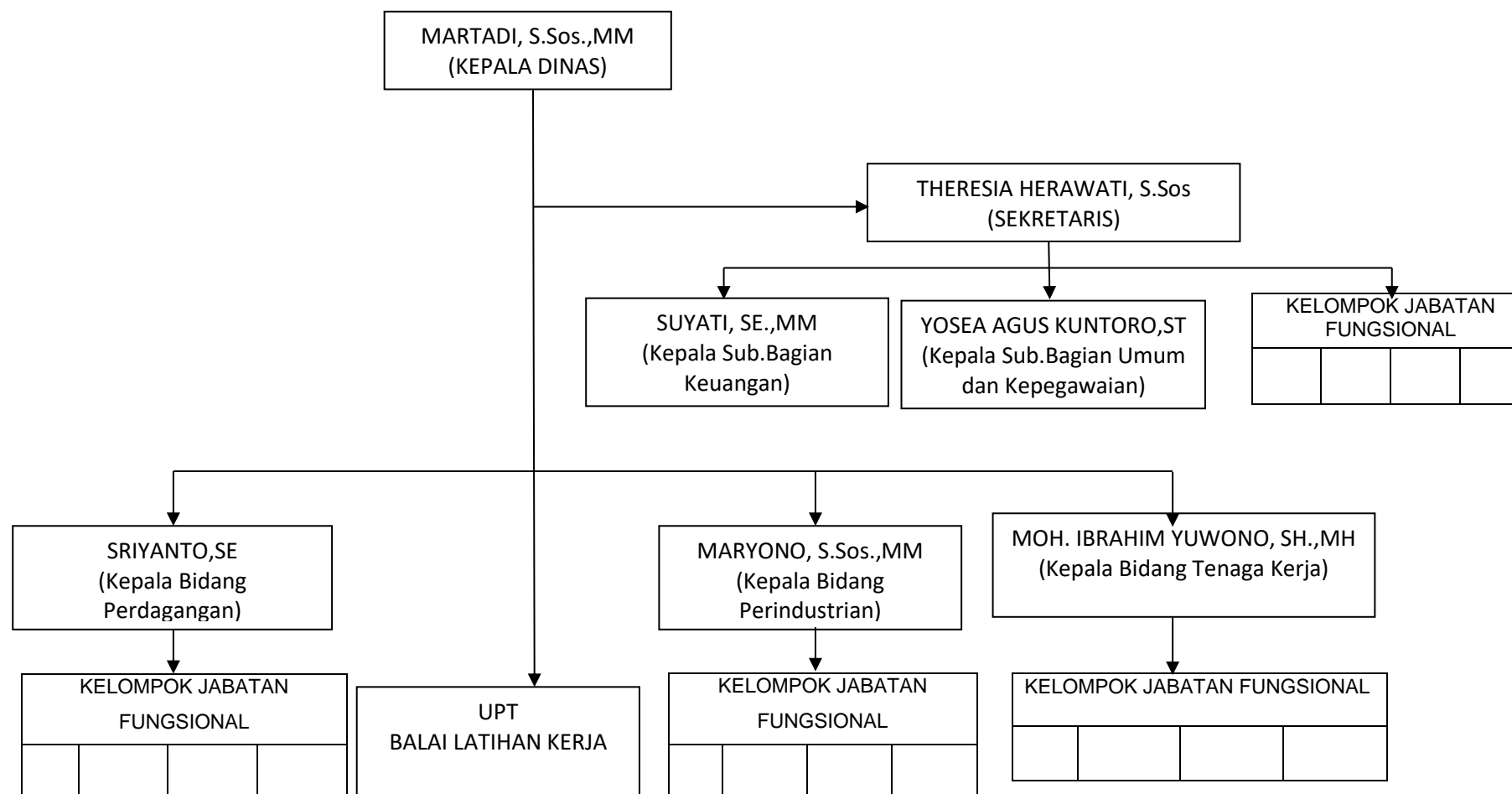
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang pada Disdagperinaker dapat dibentuk UPTD. Sebagaimana dimaksud di pimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan berada di bawah Kepala Bidang / Sekretaris.

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana diatur sesuai peraturan undang- undangan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**



2.1 Gambar Bagan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar terdiri atas aparatur PNS maupun aparatur non PNS. Jumlah PNS di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2022 sebanyak 100 orang yang diklasifikasikan berdasar golongan.

Jumlah pegawai di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Disdagperinaker berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	IV/c	3
2	IV/b	3
3	IV/a	8
4	III/d	16
5	III/c	6
6	III/b	10
7	III/a	10
8	II/d	29
9	II/c	6
10	II/b	4
11	II/a	2
12	I/d	3
	Jumlah	100

Sumber : Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja beragam, mulai dari Sekolah Dasar hingga Strata S2. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Disdagperinaker Berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2022

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	SD	3
2	SMP	8
3	SMA	32
4	D3	14
5	S1	30
6	S2	13

	Jumlah	100
--	---------------	------------

Sumber : Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar meliputi

a. Aset Tanah

Aset tanah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Aset Tanah Disdagperinaker Tahun 2022

No	Aset Tanah dan Bangunan	Luas Tanah / Luas Bangunan (m2)	Lokasi
1	Tanah dan Bangunan	LT : 5.549 LB: 2.202,5	Kel. Cangakan
2	Tanah dan Bangunan	LT : 1.000 LB : 1.715	Kel. Cangakan
3	Tanah dan Bangunan	LT :1.920 LB : 0	Pasar Palur
4	Tanah dan Bangunan	LT : 2.601 LB :0	Pasar Sibedil
5	Tanah dan Bangunan	LT : 12.795 LB : 7.440	Pasar Tawangmangu
6	Tanah dan Bangunan	LT : 28.549 LB : 1.650	Pasar Karangpandan
7	Tanah dan Bangunan	LT : 880 LB : 880	Pasar Karangsidi, Induk pasar Karangpandan
8	Tanah dan Bangunan	LT : 11.768 LB : 7.500	Pasar Tuban
9	Tanah dan Bangunan	LT : 8.503 LB : 2.045	Pasar Matesih
10	Tanah dan Bangunan	LT : 2.160 LB : 2.160	Pasar Moyoretno, Induk Pasar Matesih
11	Tanah dan Bangunan	LT : 2.253 LB : 2.253	Pasar Punukan, Induk Pasar Matesih
12	Tanah dan Bangunan	LT : 11.449 LB : 3.980	Pasar Nglano
13	Tanah dan Bangunan	LT : 5.899 LB : 5.899	Pasar Kwadungan
14	Tanah dan Bangunan	LT : 3.500 LB : -	Pasar Hewan Kwadungan

15	Tanah dan Bangunan	LT : 880 LB : 880	Pasar Batujamus
16	Tanah dan Bangunan	LT : 3.687 LB : -	Pasar Sumberejo
17	Tanah dan Bangunan	LT : 3.200 LB : 3.200	Pasar Mojogedang
18	Tanah dan Bangunan	LT : 4.830 LB : 5.080,5	Pasar Jambangan
19	Tanah dan Bangunan	LT: 4.851 LB : 4.851	Pasar Malangjiwan
20	Tanah dan Bangunan	LT: 4.725 LB : 2.360	Pasar Kebakkramat
21	Tanah dan Bangunan	LT : 960 LB : 960	Pasar Gropol
22	Tanah dan Bangunan	LT : 19.817 LB : 6.894	Pasar Jumapolo
23	Tanah dan Bangunan	LT : 1.722 LB : 1.722	Pasar Kwangsan, Induk Pasar Jumapolo
24	Tanah dan Bangunan	LT : 3.235 LB : 3.235	Pasar Lemahbang, Induk Pasar Jumapolo
25	Tanah dan Bangunan	LT : 15.646 LB : 7.726	Pasar Jatipuro
26	Tanah dan Bangunan	LT : 3.017 LB : 3.017	Pasar Kemuning
27	Tanah dan Bangunan	LT : 6.588 LB : 6.588	Pasar Belang, Jatiyoso
28	Tanah dan Bangunan	LT : 15.544 LB : 8.074	Pasar Tegalgede
29	Tanah dan Bangunan	LT : 1.718 LB : 1.718	Pasar Hewan Tegalgede
30	Tanah dan Bangunan	LT : 8.942 LB : 8.942	Pasar Jungke
31	Tanah dan Bangunan	LT : 1.466 LB : -	Pasar Ngaliyan, Induk Pasar Jungke
32	Tanah dan Bangunan	LT : 9.225 LB : 9.225	Pasar palur/ Plaza Palur
33	Tanah dan Bangunan	LT : 22.784 LB : 2.664	UPT BLK
34	Tanah dan Bangunan	LT : 10.000	Rusunawa
35	Tanah dan Bangunan	LT : 1.148 LB : 179	Mess Pindo Waringin
36	Tanah dan Bangunan	LT : 3.096 LB : 527	Pujasera Cangakan
37	Tanah dan Bangunan	LT : 2.300 LB : 1158,6	Pujasera Popongan
38	Tanah dan Bangunan	LT : 1.000	Sarana Perdagangan di Barat Bank Daerah
39	Tanah dan Bangunan	LB : 48	Gudang di Diskuk
40	Tanah dan Bangunan	LT : 4.533	Lahan kosong di Bangsri

Sumber : Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Urusan Perdagangan pada tahun 2018 – 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	%	Na	Na	10	11.6	85.71
2	Persentase pasar rakyat (milik Pemkab) yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	35.29	41.18	41.18	44.4	50.00
3	Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga	%	NA	11.11	11.11	16,67	22.22
4	Jumlah pelaku ekspor	orang	Na	Na	42	44	45
5	Persentase alat timbang yang ditera ulang	%	0	0	25	87,52	87.85
6	Jumlah produk lokal yang telah difasilitasi dalam kemitraan pameran	Produk	100	100	5	150	200

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022.

Keterangan : NA : data indikator tidak tersedia

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018 – 2022 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	%	4,99	6,47	2,16	9,47	13.89
2	Persentase pengisian aplikasi nasional (nama Aplikasinya)	%	15.57	23.3	20	16,66	39.56

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2022

Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022 tercantum pada tabel berikut

Tabel 2.6. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Na	Na	60	60	65
2.	Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	%	Na	Na	25	25,3	27
3.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	Na	62.55	60,28	55,64	70.85
4.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,28	3,15	5,96	5,89	5,7
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,24	70,45	73,55	73,15	70.70

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, 2022

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan daerah dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar merupakan pilihan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas IKM dan penataan kawasan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan terdapat permasalahan dalam perangkat daerah sebagai berikut :

1. Urusan Perdagangan :

Berdasarkan identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya jangkauan promosi dan pameran produk unggulan daerah
- b. Belum optimalnya penyediaan akses informasi harga dan stok bahan pokok barang penting.
- c. Belum optimalnya UTTP yang ditera/ tera ulang
- d. Belum optimalnya retribusi dari pasar

2. Urusan Perindustrian :

Berdasarkan identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengembangan sentra industri
- b. Belum tersedianya data pelaku industri mikro
- c. Belum memiliki dokumen perencanaan pengembangan industri

3. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Masih terdapat lembaga pelatihan kerja yang program pelatihannya belum terakreditasi;
- b. Belum optimalnya pelayanan antar kerja
- c. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
- d. Belum optimalnya kepatuhan pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan

4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur, terutama kompetensi dan keahlian;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Masih kurang optimalnya pemasaran produk lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
2. Belum optimalnya kuantitas sentra industri

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja. Tanggung jawab Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah mendukung sasaran kedua, yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan dan sasaran ke tiga yaitu meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Strategis Perdagangan RI ditetapkan visi Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang RENSTRA KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI Tahun 2020-2024 yaitu :

“ Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dengan menentukan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian yaitu: *“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berasaskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”*. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Perindustrian, yaitu:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan visi misi, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya

Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dibidang industri;
7. Menguatnya struktur industri.

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Visi Kementerian Ketenagakerjaan adalah Indonesai maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas manusai Indonesia
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan brkeadilan
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi setiap segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3.3.5 Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

Telaahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sampai dengan proses selesainya penyusunan Renstra ini masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dikemukakan dalam penyusunan Renstra ini.

3.3.6 Telaah RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Telaah RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak memperngaruhi perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penyusunan yang dilakukan terhadap program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tidak ada program yang terindikasi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan, sehingga tidak ada pembahasan khusus terhadap telaahan KLHS.

3.3.7 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Dalam perencanaan pada program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 tidak terdapat program yang terindikasi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan, sehingga tidak ada pembahasan khusus terhadap telaahan KLHS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah.

Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yang berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan
2. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
3. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dengan demikian sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif
2. Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM
4. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal						
				Perkiraan Capaian Tahun 2022	Target 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Keterangan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	76.58	76.30	77.20	77.40	77.68	77.68	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Keterangan
				Perkiraan Capaian Tahun 2022						
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,7	70.90	71.1	71.3	71.6	71.6	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,7	5.80	5.60	5.55	5.50	5.50	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan ekonomi	%	Na	4.25 -5.0	4.7	5.0	5.5	5.5	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Keterangan
				Perkiraan Capaian Tahun 2022						
	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Unit	5	5	5	7	7	7	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan ekonomi	Nilai	Na	4.25-5.0	4.7	5.0	5.5	5.5	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	sentra		5	8	11	14	14	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Keterangan
				Perkiraan Capaian Tahun 2022						
	pengembangan produk IKM									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota										
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	NA	80	65	67	70	70	
	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71.25	71.25	71.25	71.50	71.75	71.75	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotong royongan	Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja	Meningkatkan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja
	Meningkatkan pelayanan antar kerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
	Meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
Meningkatkan perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Meningkatkan pengembangan sektor perdagangan	Pemantapan kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan
	Mengoptimalkan ketersediaan SDM dan peralatan standart kemetrolagian	
	Menciptakan sentra industri mikro	Pengembangan sektor industri mikro untuk memperkuat basis industri yang tangguh
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan sumber daya kelembagaan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan kinerja sumber daya kelembagaan yang berorientasi pelayanan yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk tiga tahun yang akan datang, pada tahun 2024-2026

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

A. Bidang Perdagangan

1. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**, dengan kegiatan :
 - a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik
2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, dengan kegiatan :
 - a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, dengan kegiatan :
 - a) Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- 2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

4. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - 2) Pengawasan/Penyuluh Metrologi Legal

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

B. Bidang Perindustrian

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 6) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota dengan kegiatan :

- a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan :
 - a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 2) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaen/kota dalam penyampaian data ke SIINas

C. Bidang Tenaga Kerja

- 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2. Program Penempatan Tenaga Kerja**, dengan kegiatan :
 - a) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelayanan Antar Kerja
 - 2) Penyuluhan dan Bibingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
 - 3) Perluasan Kesempatan Kerja
 - b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

- c) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- d) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- f) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan :

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan
- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Operasional Lembaga kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

D. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - 5) Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - 6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - 7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - 7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - 8) Pemindahan Tugas ASN
 - 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/Material
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Alat Besar
 - 4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 5) Pengadaan Mebel
 - 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 8) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 5) Pemeliharaan Mebel
 - 6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana tenaga kerja Makro yang tersusun	dokumen	0	Rp15,000,000.00	1	16,500,000	0	18,500,000	1	49,650,000	Karanganyar	Tenaga Kerja
										Jumlah Dokumen Rencana tenaga kerja Mikro yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana tenaga kerja Mikro yang tersusun	dokumen	0		2		2		4		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	2	02.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana tenaga kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja	dokumen	0	1 RTK Makro 2 RTK Mikro 0 RTK Makro 2 RTK Mikro 1 RTK Makro 4 RTK Mikro						Karanganyar	Tenaga Kerja	
				2	7	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Tenaga Makro	Dokumen	1	Rp15,000,000.00	0	-	0	-	1		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	2	02.01	2	Penyusunan Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	dokumen	0	-	2	Rp16,500,000.00	2	Rp18,500,000.00	4		Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	Jumlah tenaga kerja terampil dan terlatih dibagi jumlah seluruh tenaga kerja yang terdaftar dikali 100%	%	70	Rp1,366,016,600.00	71	1,502,618,000	73	1,652,880,000	73	4,521,514,600	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.01.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang meningkatkan keterampilan kerjanya	Jumlah Lulusan Peserta Pelatihan	orang	220		220		220		705			
				2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang meningkatkan keterampilan kerjanya	Jumlah Lulusan Peserta Pelatihan	Orang	220	Rp1,036,016,600.00	220		220		660		Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													1	2	3	4	5	6	7	8		
				2	7	3	02.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga	Terlaksananya koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sector swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan	Lemba ga	5	Rp15,000,000.00	5	15000000	5	15000000	15	Rp45,000,000.00	Karang anyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota melalui	Jumlah bantuan sarana dan prasarana LPK	Unit	10	Rp100,000,000.00	10	10000000	10	100000000	30	300000000	Karang anyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga yg dibina	Lemba ga	50	Rp100,000,000.00	54	125000000	58	150000000	162	Rp375,000,000.00	Karang anyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2	7	3	02.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga yg dibina	Lembaga	50	Rp100,000,000.00	54	125000000	58	150000000	162	Rp375,000,000.00	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi	Jumlah sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	Perizinan	4	Rp5,000,000.00	4	5000000	4	5000000	12	Rp15,000,000.00		
				2	7	3	02.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi.	Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi.	Jumlah sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	Perizinan	4	Rp5,000,000.00	4	5000000	4	5000000	12	Rp15,000,000.00	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	2	Rp100,000,000.00	2	110000000	2	121000000	6	Rp331,000,000.00	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	2	Rp100,000,000.00	2	110000000	2	121000000	6	Rp331,000,000.00	Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				10	Rp	12	Rp	14					Rp	16	Rp							
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	7	3	02.05		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat Daerah	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja tingkat daerah	Dokumen	1	Rp10,000,000.00	1	10000000	1	10000000	3	Rp30,000,000.00	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	3	02.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja tingkat daerah	Dokumen	1	Rp10,000,000.00	1	10000000	1	10000000	3	Rp30,000,000.00	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi seluruh jumlah tenaga kerja yang terdaftar dikali 100%	%	50	Rp69,744,000.00	55	76,718,400	55	84,390,000	85	230,852,400	Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	orang	250		300	350+M30:R30		550		Karanganyar	Tenaga Kerja	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	7	4	02.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	15	Rp10,000,000.00	35	Rp10,000,000.00	35	Rp11,000,000.00	85		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.01	2	Pelayanan Antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang	250	Rp6,000,000.00	300	Rp6,000,000.00	350	Rp7,000,000.00	900		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan bimbingan Jabatan	Orang	150	Rp6,000,000.00	200	Rp7,000,000.00	250	Rp8,000,000.00	600		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terlaksananya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	15	Rp4,744,000.00	15	Rp5,000,000.00	15	Rp5,000,000.00	45		Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2	7	4	02.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	15	Rp4,000,000.00	15	Rp4,795,000.00	15	Rp5,000,000.00	45	Karanganyar	Tenaga Kerja	
				2	7	4	02.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin LPTKS	Jumlah penerbitan izin LPTKS	lembaga	-		-		-		-			
				2	7	4	02.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lemba ga	-		-		-		-			
				2	7	4	02.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTK	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lemba ga	-		-		-		-			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				2	7	4	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Pasar Kerja Online	dokumen	12	Rp11.00	12		12		36		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Pasar Kerja Online	Dokumen	12	Rp1,000,000.00	12	Rp2,423,400.00	12	Rp3,500,000.00	36		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	4,500	Rp12,000,000.00	4,500	Rp13,000,000.00	4,500	Rp15,000,000.00	13,500		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.03	3	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1,500	Rp5,000,000.00	1,500	Rp5,500,000.00	1,500	Rp4,516,000.00	4,500		Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													1	2	3	4	5	6	7	8		
				2	7	4	02.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	orang	500		550		600		1,050		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.04	1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	500	Rp8,000,000.00	550	Rp8,500,000.00	600	Rp9,000,000.00	1,650		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	4	02.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Orang	300	Rp2,000,000.00	350	Rp3,000,000.00	400	Rp3,750,000.00	1,050		Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	7	4	02.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PM Purna Penempatan	Jumlah PMI yang diberdayakan	Orang	15	Rp5,000,000.00	15	Rp5,000,000.00	15	Rp5,624,000.00	45		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	5	02.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan perpanjangan IMTA	Jumlah perusahaan yang melaksanakan perpanjangan IMTA	Perusahaan	13		20		25		58		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	5	02.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan perpanjangan IMTA	Jumlah perusahaan yang melaksanakan perpanjangan IMTA	Perusahaan	13	Rp6,000,000.00	20	Rp6,500,000.00	25	Rp7,000,000.00	58		Karanganyar	Tenaga Kerja
				2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah perselisihan industrial yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh perselisihan hubungan industrial dikali 100%	%	100	Rp365,750,000.00	100	382,200,000	100	399,399,000	100	1,147,349,000	Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				2	7	5	02.01						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	2	7	5	02.01		6	7	8	9	10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17	18	19
									Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50		65		80		198		Karanganyar	Tenaga Kerja
								1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	-		-		-		-		Karanganyar	Tenaga Kerja
								2		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Perusahaan	-		-		-		-		Karanganyar	Tenaga Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	7	5	02.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	Rp20,000,000.00	1	22,450,000	1	22,450,000	3		Karanganyar	Tengah Kerja
				2	7	5	02.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		60		65		70		195		Karanganyar	Tengah Kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				10	Rp	12	Rp	14					Rp	16	Rp							
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	7	5	02.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	60	Rp105,750,000.00	65	110,750,000	70	114,949,000	195		Karanganyar	Tenaga kerja
				2	7	5	02.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	30	Rp25,000,000.00	30	27,000,000	30	27,000,000	90		Karanganyar	Tenaga kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													1	2	3	4	5	6	7	8		
				2	7	5	02.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	Rp11.00	-		-		-		Karanganyar	Tenaga kerja
				2	7	5	02.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	Rp200,000,000.00	1	210,000,000	1	220,000,000	1		Karanganyar	Tenaga kerja
				2	7	5	02.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Perusahaan	25	Rp15,000,000.00	30	15,000,000	35	15,000,000	90		Karanganyar	Tenaga kerja

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan tata pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks birokrasi dan reformasi											65	Rp11.00	57		70		192			
		Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	x	xx	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	skore	71.25	Rp19,281,200,000.00	71.5	18,344,100,000	71.75	16,492,500,000	71.75	54,117,800,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	Rp25,000,000.00	8	25,000,000	8	51,000,000	25	101,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	Nilai rata-rata IKM	x	xx	1	2:01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dukuman Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	Rp5,000,000.00	2	5,000,000	2	30,000,000	7	40,000,000	Karanganyar	Sekretariat
			Indeks kearsipan	x	xx	1	2:01	2	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	Rp5,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:01	3	Sub Kgt Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	Rp4,000,000.00	1	4,000,000	1	4,000,000	3	12,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	Rp3,000,000.00	1	3,000,000	1	3,000,000	3	9,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				x	xx	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dukumen	1	Rp3,000,000.00	1	3,000,000	1	3,000,000	3	9,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	Rp5,000,000.00	2	5,000,000	6	6,000,000	6	16,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan akuntabel	kegiatan pengelolaan yang terlaksana	kegiatan	4	Rp10,520,500,000.00	4	10,520,500,000	4	11,020,500,000	12	32,061,500,000		
				x	xx	1	2:02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bulan	107	Rp10,500,000,000.00	107	10,500,000,000	107	11,000,000,000	321	32,000,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	11	12	13	14	15	16	17		
1.				x	xx	1	2:02	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	Rp2,500,000.00	1	2,500,000	1	2,500,000	3	7,500,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:02	6	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	3	Rp2,000,000.00	3	2,000,000	3	2,000,000	9	6,000,000	Karanganyar	Sekretariat
1.				x	xx	1	2:02	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	12	Rp16,000,000.00	12	16,000,000	12	16,000,000	36	48,000,000	Karanganyar	Sekretariat
2.																						
3.				x	xx	1	2:03		Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan tertib	laporan rencana kebutuhan barang dan rekonsiliasi	laporan	3	Rp10,000,000.00	3	12,000,000	3	14,000,000	3	36,000,000		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	
				x	xx	1	2:03	1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	2	Rp2,000,000.00	2	2,000,000	2	2,000,000	6	6,000,000	Karanganyar	Sekretariat
4.				x	xx	1	2:03	5	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	1	Rp8,000,000.00	1	10,000,000	1	12,000,000	3	30,000,000	Karanganyar	Sekretariat
5.																						
6.				x	xx	1	2:04		Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib	laporan penerimaan pendapatan	14	Rp15,000,000.00	14	15,000,000	14	15,000,000	42	45,000,000			
7.				x	xx	1	2:04	3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	laporan	1	Rp5,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000	Karanganyar	Sekretariat
8.				x	xx	1	2:04	4	Pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah	Jumlah data obyek, subyek dan wajib retribusi daerah	Jumlah data obyek, subyek dan wajib retribusi daerah	dokumen	1	Rp5,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.				x	xx	1	2:04	5	Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah	laporan	12	Rp5,000,000.00	12	5,000,000	12	5,000,000	36	15,000,000	Karanganyar	Sekretariat
10.																			-			
11.				x	xx	1	2:05		Kegiatan administrasi kepegawaian dan sosialisasi perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kepegawaian dan sosialisasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen evaluasi	dokumen	3	Rp177,000,000.00	3	177,000,000	3	177,000,000	9	531,000,000		
12.				x	xx	1	2:05	5	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	1	Rp2,000,000.00	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000	Karanganyar	Sekretariat
13.				x	xx	1	2:05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	50	Rp100,000,000.00	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													1	2	3	4	5	6	7	8		
14.				x	xx	1	2:05	10	Sosialisasi peraturan perundang undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	orang	50	Rp75,000,000.00	50	75,000,000	50	75,000,000	150	225,000,000	Karanganyar	Sekretariat
15.																			-			
16.				x	xx	1	2:06		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	laporan kegiatan administrasi	paket	7	Rp472,600,000.00	7	561,600,000	7	652,000,000	21	1,686,200,000		
17.				x	xx	1	2:06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	Rp15,000,000.00	1	17,000,000	1	20,000,000	3	52,000,000	Karanganyar	Sekretariat
18.				x	xx	1	2:06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	Rp10,000,000.00	1	12,000,000	1	14,000,000	3	36,000,000	Karanganyar	Sekretariat
19.				x	xx	1	2:06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	Rp225,000,000.00	1	250,000,000	1	300,000,000	3	775,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				x	xx	1	2:06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	laporan	1	Rp65,000,000.00	1	75,000,000	1	85,000,000	3	225,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	1	Rp150,000,000.00	1	200,000,000	1	225,000,000	3	575,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	Rp2,600,000.00	1	2,600,000	1	3,000,000	3	8,200,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	1	Rp5,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000	1	15,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib	jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	28	Rp3,823,100,000.00	28	2,785,000,000	28	300,000,000	84	6,908,100,000		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				x	xx	1	2:07	2	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:07	5	Pengadaan mebel	jumlah paket yang disediakan	jumlah paket yang disediakan	unit	20	Rp50,000,000.00	40	100,000,000	40	100,000,000	100	250,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:07	6	pengadaan mesin dan peralatan lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	5	Rp118,100,000.00		120,000,000		125,000,000		363,100,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:07	9	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	Rp3,500,000,000.00	1	2,500,000,000	1	-	2	6,000,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	Rp40,000,000.00	1	50,000,000	1	60,000,000	3	150,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				x	xx	1	2:07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	Rp115,000,000.00	1	15,000,000	1	15,000,000	3	145,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah layanan layanan umum kantor	laporan	3	Rp3,343,000,000.00	3	3,353,000,000	3	3,363,000,000	9	10,059,000,000		
				x	xx	1	2:08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	Rp3,000,000.00	1	3,000,000	1	3,000,000	3	9,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:08	2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1	Rp340,000,000.00	1	350,000,000	1	360,000,000	3	1,050,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:08	4	penyediaan jasa layanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	Rp3,000,000,000.00	1	3,000,000,000	1	3,000,000,000	3	9,000,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				x	xx	1	2:09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	jumlah kegiatan pemeliharaan	unit	78	Rp895,000,000.00	78	895,000,000	78	900,000,000	234	2,690,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	50	Rp250,000,000.00	50	250,000,000	50	250,000,000	150	750,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	25	Rp45,000,000.00	25	45,000,000	25	50,000,000	75	140,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:09	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	unit	1	Rp300,000,000.00	1	300,000,000	1	300,000,000	1	900,000,000	Karanganyar	Sekretariat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				x	xx	1	2:09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	Rp200,000,000.00	1	200,000,000	1	200,000,000	1	600,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				x	xx	1	2:09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	Rp100,000,000.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	Karanganyar	Sekretariat
				3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					Rp594,000,000.00		643,400,000		693,740,000		1,931,140,000		
				3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan Industri yang Disusun	Jumlah Dokumen yang tersusun	dokumen	1	Rp500,000,000.00	0	540,000,000	0	580,000,000	1	1,620,000,000		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
											%	25		27		29		29				
				3	31	2	02.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen RPIK	Jumlah dokumen RPIK	%	1		0		0		1			
				3	31	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen RPIK	Jumlah dokumen RPIK	Dokumen	1	Rp100,000,000.00	-	0	-	0	1	100,000,000	Karanganyar	DISDAGP ERIN

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	31	2	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Dokumen	1	Rp125,000,000.00	1	175,000,000	1	195,000,000	3	495,000,000	Karanganyar	DISDAGERIN
				3	31	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen /Laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi dan pelatihan	Jumlah Dokumen /Laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi dan pelatihan	Dokumen	2	Rp180,000,000.00	2	230,000,000	2	240,000,000	6	650,000,000	Karanganyar	DISDAGERIN
				3	31	2	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen / Laporan terkait IKM yang menerima fasilitasi	Jumlah Dokumen / Laporan terkait IKM yang menerima fasilitasi	Dokumen	1	Rp40,000,000.00	1	60,000,000	1	65,000,000	3	165,000,000	Karanganyar	DISDAGERIN

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				10	Rp	12	Rp	14					Rp	16	Rp							
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	31	2	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen / Laporan terkait IKM yang menerima bimbingan teknis atau pengembangan produk atau promosi dan pemasaran produk industri atau kemitraan IKM	Jumlah Dokumen / Laporan terkait IKM yang menerima bimbingan teknis atau pengembangan produk atau promosi dan pemasaran produk industri atau kemitraan IKM	Dokumen	1	Rp55,000,000.00	1	75,000,000	1	80,000,000	3	210,000,000	Karanganyar	DISDAGP ERIN
				3	31	2	02.01	6	Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen evaluasi	Jumlah Dokumen evaluasi	Dokumen	-	Rp -	-	0	-	0	-	0	Karanganyar	DISDAGP ERIN

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	31	3					%	11	Rp44,000,000.00	11	48,400,000	11	53,240,000	11	145,640,000		
								PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN KOTA	Jumlah hasil pemantauan , pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah	Jumlah perizinan berusaha yang dipantau dan dianalisa dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan pada tahun dikali 100%											

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	31	3	02.01		dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi dan tinggi	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi dan tinggi			Rp11.00								

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	31	3	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi dan tinggi	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi dan tinggi	Dokumen	1	Rp29,000,000.00	1	31,400,000	1	34,240,000	3	94,640,000	Karanganyar	DISDAGERIN
				3	31	3	02.01	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha	Dokumen	1	Rp15,000,000.00	1	17,000,000	1	19,000,000	3	51,000,000	Karanganyar	DISDAGERIN

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas	Tersedianya informasin industri 0-6 bulan, 7-12 bulan, informasi produksi, kapasitas, bahan baku dan tenaga kerja	%	75	Rp50,000,000.00	75	55,000,000	75	60,500,000	75	165,500,000		
				3	31	4	02.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas	Jumlah Dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas	dokumen	1		1		1		3			
				3	31	4	02.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis data Indsutri serta data lain lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Indsutri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri IKM pada SIINAs	Jumlah Dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri IKM pada SIINAs	Dokumen	1	Rp25,000,000.00	1	30,000,000	1	35,500,000	1	90,500,000	Karanganyar	DISDAGP ERIN

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				10	Rp	12	Rp	14					Rp	16	Rp							
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	31	4	02.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas	Jumlah Dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas	Dokumen	1	Rp20,000,000.00	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	Karanganyar	DISDAGERIN
				3	31	4	02.01	3	Pemantuan dan evaluasi kepatuhan perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah Dokumen terkait Pemantauan dan evaluasi Data Industri IKM pada SIINas	Jumlah Dokumen terkait Pemantauan dan evaluasi Data Industri IKM pada SIINas	Dokumen	1	Rp5,000,000.00	1	5,000,000	1	5,000,000	3	15,000,000	Karanganyar	DISDAGERIN
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					Rp1,052,839,400.00		1,143,026,500		1,241,024,000		3,436,889,900		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian dengan Bersumber Potensi Ekonomi Lokal	Pertumbuhan ekonomi									nilai	4.7	Rp11.00	5		5.5						
		Meningkatkan Produktivitas Perdagangan yang Berdaya Saing	Jumlah Produk Lokal yang Berpotensi Unggulan								produk	5		7		7		7			
			3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	Jumlah komitmen perusahaan berizin yang dipenuhi dibagi jumlah seluruh perusahaan dikali 100%	%	30	Rp18,896,400.00	35	20,786,000	40	22,865,000	40	62,547,400		

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	30	2	02.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen	rekom	100%		100%		100%		100%		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		rekom	100%	13,000,000	100%	14,000,000	100%	15,000,000	100%	42,000,000	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	2	02.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	ijin	100%		100%		100%		100%			
				3	30	2	02.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	ijin	100%	5,896,400	100%	6,786,000	100%	7,865,000	100%	20,547,400	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	30	2	02.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah surat izin perdagangan yang diterbitkan	100%	Rp11.00	100%		100%					

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	30	2	02.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah surat ijin perdagangan yang diterbitkan	ijin	100%	Rp11.00	100%		100%		100%		Karanganyar	DISDAGP ERINAKER

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	20	2	02.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah laporan	kecamatan	17	Rp11.00	17		17		17		
				2	20	2	02.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		kecamatan	17		17		17		17	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3	30	2	02.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan	kecamatan	17		17		17		17			
				3	30	2	02.07	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan	kecamatan	17		17		17		17	Karanganyar	DISDAGP ERINAKER	
				3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan standarisasi SNI secara bertahap	Jumlah sarana perdagangan yang memenuhi standarisasi SNI dibagi jumlah sarana perdagangan kabupaten x 100%	%	55.5	Rp754,840,000.00	55.55%	815,227,200	61.11%	880,445,000	61.11%	2,450,512,200		
				3	30	3	02.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	pasar	17		17		17		17			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	30	3	02.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah ketersediaan sarana perdagangan	Jumlah ketersediaan sarana perdagangan	pasar	17	Rp84,840,000.00	17 pasar	Rp125,227,200	17 pasar	Rp170,445,000	17 pasar	Rp380,512,200	Karang anyar	
				3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	pasar	17	Rp640,000,000.00	17 pasar	Rp650,000,000	17 pasar	Rp660,000,000	17 pasar	Rp1,950,000,000	Karang anyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	3	02.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pasar	17		17		17		17			
				3	30	3	02.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pasar	17	Rp30,000,000.00	17 pasar	40000000	17 pasar	50000000	17 pasar	Rp120,000,000	Karang anyar	DISDAGP ERINAKE R

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase akses informasi harga baru dibagi jumlah akses informasi kali 100%	%	23	Rp12,000,000.00	32	13,200,000	41	14,520,000	41	39,720,000		
				3	30	4	02.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan ketersediaan barang	Jumlah laporan ketersediaan barang	laporan	17		17		17		17		
				3	30	4	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	17		17		17		17	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3	30	4	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	17		17		17		17		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	4	02.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	17		17		17		17		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	4	02.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok dan penting	Jumlah laporan pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok dan penting	laporan	17		17		17		17			

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													10	Rp11.00	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				3	30	4	02.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	17	7,000,000	17	8,000,000	17	9,000,000	17	24,000,000	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R	
				3	30	4	02.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan	17		17		17		17		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	30	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	titik	2		2		2		2		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	4	02.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%											
				3	30	4	02.03	4	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	17	5,000,000	17	5,200,000	17	5,520,000	17	15,720,000	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk ekspor	Jumlah produk ekspor	produk	50	Rp9,974,000.00	55	10,971,400	55	12,068,000	55	33,013,400		
				3	30	5	02.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pelaku ekspor	Pembinaan pelaku ekspor	pelaku ekspor	50		55		55		55			
				3	30	5	02.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku	17	Rp9,974,000.00	17	10,971,400	17	12,068,000	17	33,013,400	Karanganyar	DISDAGERINAKER
				3	30	5	02.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku	17		1		1		1		Karanganyar	DISDAGERINAKER
				3	30	5	02.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku	17								Karanganyar	DISDAGERINAKER

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13		
				3	30	5	02.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku	17	Rp11.00	4		4		4		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	5	02.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	pelaku	17		1		1		1		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal	Jumlah kepatuhan produk dan UTTP dibagi jumlah alat kali 100 %	%	65	Rp57,129,000.00	70	62,841,900	75	69,126,000	75	189,096,900		
				3	30	6	02.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya tera dan tera ulang	pelaksanaan tera/tera ulang	kecamatan	17		17		17		17			
				3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	kecamatan	17	Rp57,129,000.00	62,841,900		69,126,000		Rp189,096,900.00	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R	

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
				3	30	6	02.01	2					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	kegiatan	1	Rp11.00	1		1		1		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	produk	30	Rp200,000,000.00	40	220,000,000	50	242,000,000		662,000,000		
				3	30	7	02.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	terlaksananya pameran	Pelaksanaan pameran dalam satu tahun	kegiatan	1		1		1		1			
				3	30	7	02.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	kegiatan	1		1		1		1		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	Bidang
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
													1	2	3	4	5	6	7	8		
				3	30	7	02.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	kecamatan	17	Rp200,000,000.00	17	220,000,000	17	242,000,000	17	662,000,000	Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	7	02.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	sistem	1		1		1		1		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R
				3	30	7	02.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	kegiatan	1		1		1		1		Karanganyar	DISDAGP ERINAKE R

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026. Indikator ini merupakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah hingga pada akhir tahun 2026. Target ini merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar 2024-2026.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) tertera pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Urusan Tenaga Kerja									
	Indek Pembangunan Manusia		Berdasarkan hasil perhitungan BPS yang tertuang dalam Karanganyar dalam Angka		76.58	76.80	77.20	77.40	77.68	77.68
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka		70,7	70,9	71.1	71.3	71.6	71.6
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka		5.7	5.65	5.60	5.55	5.50	5.5
2	Urusan Perdagangan									
	Pertumbuhan Ekonomi				5.87	5.9	6	6.15	6.2	6.2

NO	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
					Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
		Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan			Na	Na	5	7	7	7
3	Urusan Perindustrian									
	Pertumbuhan Ekonomi				5.87	5.9	6	6.15	6.20	6.20
		Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk			Na	0	2	4	6	6
4	Urusan Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
	Indeks Reformasi Birokrasi		Hasil Penilaian dari Kemenpan atas IRB Kabupaten		63	64	65	67	70	70
67		Nilai Sakip	5.88		71.25	71.25	71.25	71.50	71.75	71.75

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Target Kinerja tahun		
				2024	2025	2026
	Urusan Tenaga Kerja					
1	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja makro Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja mikro	Dokumen dokumen	0 0	1 2	0 2
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	%	70	71	73
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, dibagi Jumlah Perusahaan x 100%	%	55	57	60
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan, dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	%	50	55	55
	Urusan Perdagangan					
5	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan berizin	jumlah komitmen perusahaan berizin yang dipenuhi dibagi jumlah seluruh perusahaan kali seratus persen	%	30	35	40
6	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota kali 100%	%	65	70	75
	Perindustrian					
7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n) - jumlah industry kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi jumlah industry kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	%	30	32	33

Tabel 7.3
Indikator Program Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2024-2026

No	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	ROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun - Rencana Tenaga Kerja Makro - Rencna Tenaga kerja Mikro	dokumen			0 0	1 2	0 2	1 4
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih	%			70	71	73	73
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%			50	55	55	55
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%			100	100	100	100
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan Industri yang Disusun	dokumen			1	0	0	1
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar	%			25	27	29	29
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN KOTA	Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah	%			11	11	11	11
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas	%			75	75	75	75
8	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin	%			30	35	40	40

No	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan standarisasi SNI secara bertahap	%			55.5	61.11	61.11	61.11
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase akses informasi harga	%			23	32	41	42
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk ekspor	produk			50	55	55	55
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal	%			65	70	75	75
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi	produk			30	40	50	50
14	PROGRAM PENUNJAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	skore			71.25	71.50	71.75	71.75

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.